

Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Level Rumah Tangga di Kalurahan Baciro, Kota Yogyakarta

Analysis Of Household Level Waste Management Policies In Baciro Village, Yogyakarta City

Endah Ayu Kusuma^{1*}, Nindya Christy Hamida², Nanda Widhianta³, Qarra Salma Setiawan⁴, Yudistira Widinugroho⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Universitas Gadjah Mada
Email: ¹endahayu02@mail.ugm.ac.id, ²nindyach06@mail.ugm.ac.id, ³nanda.widhianta@ugm.ac.id, ⁴qarrasalma2020@mail.ugm.ac.id, ⁵yudistira.sv@mail.ugm.ac.id

*Penulis korespondensi: endahayu02@mail.ugm.ac.id

Direview : 19 September 2023

Diterima : 25 Januari 2024

ABSTRAK

Kota Yogyakarta menjadi salah satu penyumbang sampah di TPST Piyungan. Produksi sampah di Kota Yogyakarta tahun 2021 mencapai 327 juta ton per hari dengan komposisi sampah terbesar adalah sampah rumah tangga sebesar 55,2%. Kalurahan Baciro menjadi salah satu sumber sampah dengan volume sampah yang dihasilkan sebesar 28,57 m³ per hari. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Baciro sebelum dan sesudah adanya kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, faktor-faktor yang berhubungan keberhasilan dan hambatan, serta relevansi penerapan pengelolaan sampah dengan kondisi kesehatan di Kalurahan Baciro. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan mix method berupa penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan secara sederhana melalui interpretasi data hasil kuesioner ke bentuk persentase grafik. Hasil olah data dan analisis menunjukkan bahwa Kalurahan Baciro sudah melaksanakan Surat Edaran dari Pj. Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik dan berhasil mengurangi jumlah akhir sampah yang dibuang ke TPST Piyungan. Adanya Program Gerakan Zero Sampah Anorganik berhasil membawa perkembangan lebih baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Baciro. Keberadaan program ini telah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan implementasi bank sampahnya telah mampu termonitor ke sistem JSS (*Jogja Smart Service*). Namun, masih terdapat tantangan dalam hal regenerasi dan kontribusi generasi muda. Faktor penghambat proses pengelolaan sampah adalah pada keterbatasan lahan dan tempat pemilahan sampah, sedangkan untuk faktor pendukung keberhasilan adalah jika lahan tersedia dengan cukup dan ada peningkatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah. Masalah keterbatasan lahan dalam pelaksanaan bank sampah menimbulkan risiko penurunan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Bank sampah, Kalurahan Baciro, pengelolaan sampah, rumah tangga, kesehatan masyarakat

ABSTRACT

The city of Yogyakarta is one of the contributors to waste at the Piyungan TPST. Waste production in the City of Yogyakarta in 2021 will reach 327 million tons per day with the largest composition of waste being household waste by 55.2%. Baciro Urban Village is one of the sources of waste with a volume of waste generated of 28.57 m³ per day. This study aims to determine the implementation of household waste management in Baciro Village before and after the Zero Inorganic Waste Movement Program policy, factors related to success and obstacles, and the relevance of waste management implementation to health conditions in Baciro Village. The research approach used is a mix method in the form of a combination of qualitative and quantitative approaches. Quantitative analysis was carried out simply by interpreting the data from the questionnaire results in the form of percentage graphs. The results of data processing and analysis show that Baciro Sub-district has implemented the Circular Letter from Pj. Mayor of Yogyakarta Number 660/6123/SE/2022 regarding the Zero Inorganic Waste Movement and succeeded in reducing the final amount of waste disposed of at TPST Piyungan. The existence of the Zero Inorganic Waste Movement Program has brought better development in household waste management in Baciro Kalurahan. The

existence of this program has increased community empowerment and the implementation of the waste bank has been able to be monitored to the JSS (Jogja Smart Service) system. However, there are still challenges in terms of regeneration and the contribution of the younger generation. The inhibiting factors of the waste management process are the limited land and waste sorting bins, while the supporting factors for success are if there is sufficient land available and there is an increase in socialization or counseling regarding waste management. The problem of limited land in the implementation of waste banks poses a risk of decreasing public health.

Keywords: Waste bank, Kalurahan Baciro, waste management, household, public health

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan isu multisektor yang memberikan berbagai macam dampak kepada masyarakat dan ekonomi. Dampak negatif dapat terjadi jika masyarakat tidak mengelola sampah dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Begitu sebaliknya, dampak positif dapat diperoleh jika masyarakat mampu mengelola sampah dengan baik. Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan persoalan sampah yang seakan tidak kunjung berhenti dan belum mendapatkan solusi maksimal serta menjadi sorotan berbagai pihak.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta, pada tahun 2021 perkiraan produksi sampah di Kota Yogyakarta ini mencapai 327,40 ton per hari. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber sampah paling tinggi di Kota Yogyakarta adalah Sampah Rumah Tangga dengan persentase mencapai 55,2%. Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta semakin kompleks ketika Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah hasil konsumsi masyarakat Kota Yogyakarta. Lahan tersebut awalnya memiliki daya tampung sebesar 1,5 juta ton sampah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta, daya tampung TPST Piyungan pun semakin berkurang. Pada tahun 2023, jumlah sampah yang masuk ke TPST Piyungan per hari mencapai 1.200 ton. Dengan demikian, daya tampung TPST Piyungan hanya mampu bertahan selama 1.200 ton / 1,5 juta ton = 0,008 tahun. Hal inilah yang menjadikan Kota Yogyakarta dikenal sebagai “Yogyakarta Darurat Sampah”.

Dari data tersebut, secara saksama diketahui kondisi pengelolaan sampah di level rumah tangga membutuhkan sebuah formula baru untuk menyukkseskan pengurangan volume sampah. Hal tersebut secara langsung akan membantu meringankan beban timbunan akhir sampah masalah keterbatasan kemampuan TPS dan TPST Piyungan dalam menampung sampah-sampah di Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan itu, pada akhir tahun 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan pengelolaan sampah khususnya di level rumah tangga melalui Surat Edaran dari Pj. Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Tujuan program tersebut untuk meminimalisasi pembuangan sampah akhir ke TPST Piyungan. Hanya sampah organik dan sampah residu saja yang boleh dibuang ke TPST Piyungan, sedangkan sampah anorganik harus disetor ke Bank Sampah. Hal tersebut mendorong pemerintah Kota Yogyakarta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah. Program Gerakan Zero Sampah Anorganik ini dimulai sejak awal bulan Januari hingga April 2023.

Kalurahan Baciro menjadi lokasi studi kasus dilaksanakannya penelitian ini. Kalurahan Baciro turut menjadi salah satu sumber sampah di Kota Yogyakarta dengan volume sampah yang dihasilkan sebesar 28,57 m³ per hari. Adanya surat edaran tersebut, Kalurahan Baciro lebih mengupayakan secara mendalam agar pengelolaan sampah di level rumah tangga berjalan dengan lebih baik. Bahkan, sebelum adanya surat edaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta telah ada pendirian bank sampah yang turut memberdayakan masyarakat. Upaya menyukkseskan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik dilakukan oleh Kalurahan Baciro melalui adanya Surat Keputusan (SK) bahwa setiap RW (Rukun Warga) diwajibkan memiliki Bank Sampah bahkan juga di level RT (Rukun Tetangga). Selain itu, pihak kalurahan juga memfasilitasi pendampingan bank sampah secara rutin melalui faskel (fasilitator kalurahan).

Upaya-upaya lain seperti adanya sosialisasi pemilahan sampah terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan terkait pentingnya pengelolaan sampah di level rumah tangga. Harapannya, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kalurahan Baciro dapat mencapai keberhasilan dalam memutus permasalahan terkait sampah. Kunci solusi atas permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui level terkecil di lingkup masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik melakukan analisis terkait implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Baciro sebelum dan sesudah adanya kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, faktor-faktor yang berhubungan keberhasilan dan hambatan, serta relevansi penerapan pengelolaan sampah dengan kondisi kesehatan di Kalurahan Baciro.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di setiap Rukun Warga (RW) di Kalurahan Baciro, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 21 RW dalam rentang waktu pencarian data penelitian sekitar April, Mei, dan Juni 2023.

2.2. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung dengan para kader pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Baciro. Selain itu, juga akan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner yang dibagikan kepada warga masyarakat di seluruh Rukun Warga (RW) di Kalurahan Baciro. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak Kalurahan Baciro dan kader seperti *database* sebaran lokasi tinggal warga, bank sampah, aktivitas pengelolaan sampah, dan kontak dari para kader lainnya. Selain itu, juga berbentuk informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur karya tulis dan publikasi data pemerintah terkait yang relevan dengan judul penelitian.

2.3. Subjek Penelitian & Pengukuran Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah, kader-kader pengelolaan sampah, dan warga masyarakat yang tinggal di Kalurahan Baciro. Total populasi yang tinggal di Kalurahan Baciro adalah 12.222 jiwa (laki-laki dan perempuan) per 5 April 2023. Berikut pengukuran sampel yang digunakan:

$$n = \frac{N \times X}{(X+N-1)} \text{ di mana } X = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \times p \times (1-p)}{MOE^2}$$

Keterangan:

N (*population size*) = 12.222

α (*confidence level*) = 95%

MOE (*margin of error*) = 5%

z (*critical values on the standard normal distribution for α*) = 1,96

p (*sample proportion*) = 2,6%

Nilai proporsi populasi sejumlah 2,6% tersebut didapatkan dari rata-rata keikutsertaan warga per RW sejumlah 15 orang dikali dengan total 21 RW maka proporsi = 315/12.222 orang. Hasil perhitungan menunjukkan hasil sampel adalah minimal 39 atau lebih responden yang diperlukan untuk mendapatkan perhitungan valid. Pada pelaksanaannya, terdapat 106 responden yang berpartisipasi.

2.4. Teknik Pendekatan dan Analisis Data

Pendekatan penelitian yang akan digunakan merupakan mix method berupa penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, pencarian data-data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi foto, rekaman suara, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara; kedua, reduksi dan pembersihan data; ketiga, interpretasi dan analisis deskriptif oleh penulis. Secara kuantitatif, dilakukan secara sederhana melalui interpretasi data hasil kuesioner ke bentuk persentase grafik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi pengelolaan sampah level rumah tangga di Kalurahan Baciro sebelum dan sesudah Program Gerakan Zero Sampah Anorganik

3.1.1. Sebelum Program Gerakan Zero Sampah Anorganik

Kalurahan Baciro menjadi salah satu kelurahan yang sudah melakukan pengelolaan sampah sejak tahun 2015 melalui pendirian bank sampah. Pada saat itu belum seluruh RW mendirikan bank sampah dan pelaksanaannya masih tidak terlalu aktif. Lalu secara perlahan, di tahun 2017 kegiatan bank sampah di Kalurahan Baciro aktif kembali dan jumlah RW yang mendirikan bertambah. Di setiap bank sampah memiliki koordinator pelaksana yang periode lama kerjanya tidak menentu. Koordinator tersebut berasal dari

sukarelawan warga di RW masing-masing. Kemudian, di tahun 2019 peran faskel (fasilitator kelurahan) dihadirkan oleh pihak kelurahan. Faskel berperan dalam mendampingi berbagai kegiatan di tiap-tiap bank sampah secara teratur. Faskel akan membuat laporan dari aktivitas-aktivitas bank sampah dari mulai penimbangan sampah, pemilahan sampah hingga data-data pengeluaran sampah rumah tangga per RW (Rukun Warga). Kemudian, laporan hasil yang terlaksana di lapangan akan diserahkan ke pihak kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi melalui pengisian kuesioner, diperoleh hasil bahwa saat awal program Bank Sampah mulai diimplementasikan sebagian besar dimulai dari inisiasi dan kesadaran masyarakat sendiri yang besar peranannya didominasi oleh koordinator bank sampah. Selain itu, tetap ada beberapa pihak yang membantu mendampingi, memberi dukungan, dan ikut berpartisipasi menggerakkan juga mengoptimalkan program bank sampah. Pihak tersebut, antara lain pemerintah daerah/instansi, fasilitator kelurahan, dan komunitas pecinta lingkungan.

Di awal pendirian bank sampah, terdapat beberapa bantuan berupa penyediaan sarana/prasarana, sosialisasi/pelatihan, dan fasilitator kelurahan yang diberikan oleh pemerintah daerah/instansi terkait. Selain itu, peran lain dari pemerintah daerah/instansi terkait adalah menjadi pihak yang membuat regulasi guna mendukung program bank sampah. Kebijakan dan berbagai payung hukum berguna mendorong serta memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun, tetap saja masyarakat adalah aktor yang berperan paling penting. Masyarakat sebagai penggerak program bank sampah, penyedia kapasitas kerja, pelaksana koordinasi dan teknis untuk mengumpulkan sampah hingga proses penimbangan yang teratur dilakukan tiap bulan.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner diperoleh informasi mengenai keikutsertaan warga sebagai anggota bank sampah. Pada keanggotaan bank sampah, 29,2% responden telah bergabung lebih dari 5 tahun, 11,3% responden telah bergabung sekitar 4 sampai 5 tahun, dan sebanyak 33% responden baru bergabung dengan keanggotaan bank sampah selama 1 sampai 3 tahun. Hal ini menandakan banyak masyarakat yang telah bergabung dengan bank sampah bahkan sebelum keluarnya surat edaran mengenai Program Gerakan Zero Sampah Anorganik dari pemerintah kota.

3.1.2. Setelah Program Gerakan Zero Sampah Anorganik

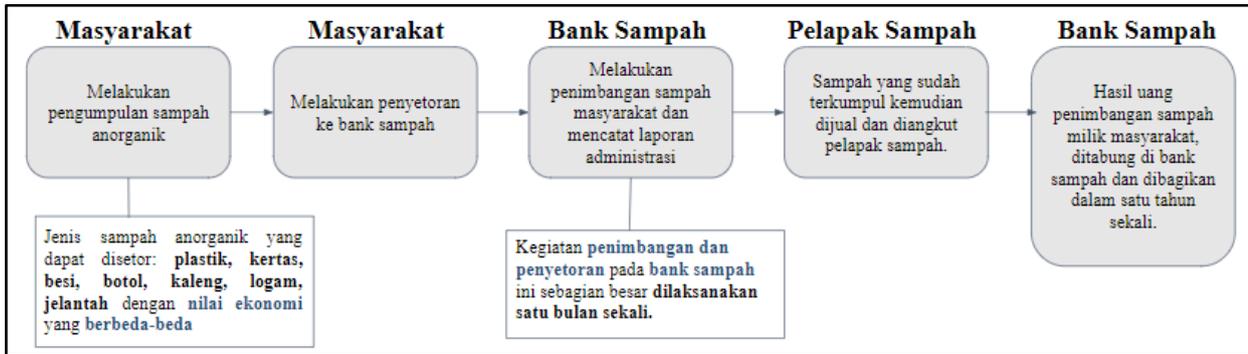
Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik pada tanggal 12 Desember 2022. Peraturan tersebut mengatur pengelolaan sampah untuk berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Mengenai Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meminimalisasi volume pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan karena kondisinya yang sudah *over-capacity*. Gerakan Zero Sampah Anorganik mulai diberlakukan pada Januari tahun 2023 dengan mewajibkan seluruh rumah tangga melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dan residu dapat dibuang ke TPST Piyungan, tetapi khusus sampah anorganik harus diolah.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat di Kelurahan Baciro melakukan pengumpulan sampah anorganik diikuti dengan pengelolaan di bank sampah. Hingga saat ini telah terdapat 23 bank sampah yang tersebar di 21 RW di Kelurahan Baciro, hanya di RW 09 yang tidak memiliki bank sampah. Jenis sampah anorganik yang dapat disetor ke bank sampah dapat berupa plastik, kertas, besi, botol, kaleng, logam, dan jelantah dengan nilai ekonomi yang berbeda-beda. Jenis sampah yang bisa disetor ke bank sampah juga tergantung dari kesediaan tiap pengepul. Tidak semua pengepul mau menerima semua jenis-jenis sampah tersebut. Hingga saat ini, pihak kelurahan telah berhasil bermitra dengan 5 pengepul besar untuk pengangkutan dan penjualan sampah.

Pemanfaatan terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkan dan tidak dijual ke bank sampah dilakukan dalam bentuk pembuatan pupuk secara mandiri (sampah organik) sebanyak 13,2% dan kerajinan tangan/produk kreatif sebanyak 5,7%, sedangkan 81,1% tidak melakukan pemanfaatan lainnya atau cukup disetor ke bank sampah saja. Pembuangan sampah menuju ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sebagian besar dilakukan secara mandiri oleh warga. Kemudian, barulah petugas akan mengambil sampah tersebut di TPS untuk dibawa ke TPST Piyungan. Terdapat tiga lokasi TPS di sekitaran Kelurahan Baciro, antara lain di dekat SD Kanisius Gayam 1, dekat Asrama Dharmaputra Baciro, dan di samping SPBU COCO Pertamina 41.551.01.

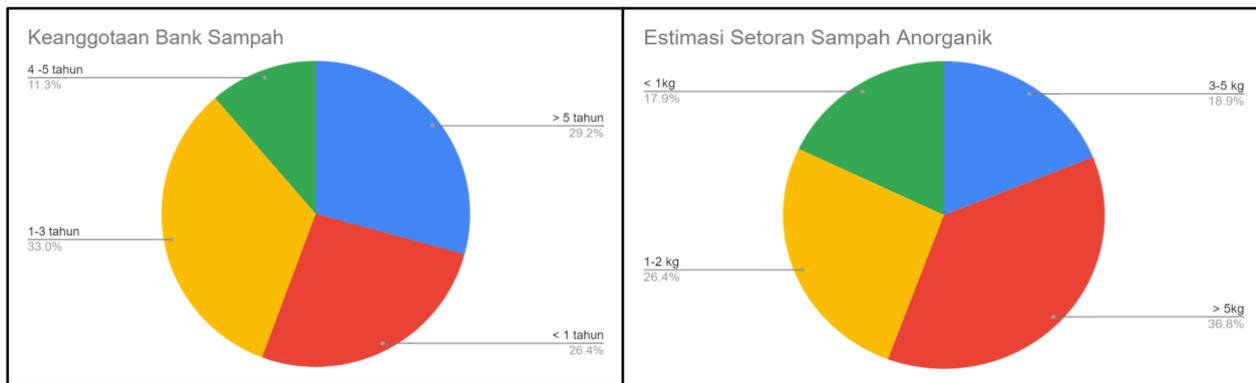
Kegiatan penyeteroran dan penimbangan sampah pada bank sampah di seluruh RW Kelurahan Baciro sebagian besar dilakukan setiap satu bulan sekali, tetapi terdapat beberapa RW yang melakukan penimbangan setiap dua kali dalam satu bulan atau bahkan satu minggu sekali. Hasil uang dari penimbangan sampah ini

kemudian ditabung di bank sampah dan biasanya dibagikan satu tahun sekali dalam bentuk uang tunai atau sembako. Lebih jelasnya berikut alur pelaksanaan bank sampah:



Gambar-1. Alur pelaksanaan bank sampah di Kalurahan Baciro

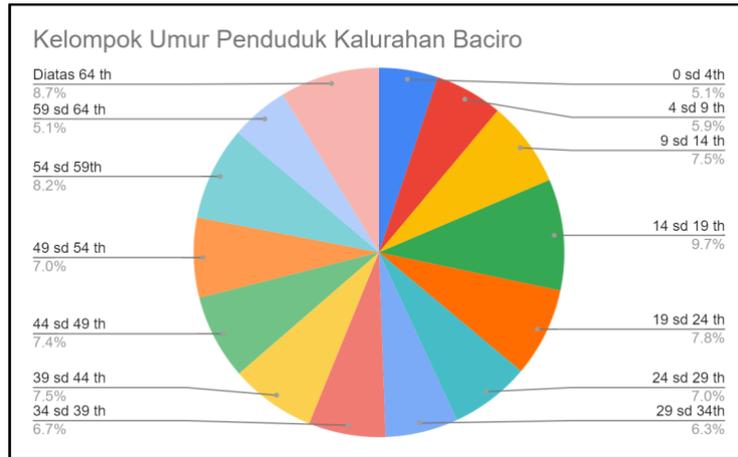
Pelaksanaan bank sampah setelah adanya Program Zero Sampah Anorganik di lapangan kurang lebih dapat dijelaskan dari banyaknya jumlah setoran sampah. Estimasi kuantitas sampah anorganik kurang dari 1 kg sebanyak 17,9%, 1-2 kg sebanyak 26,4%, 3-5 kg sebanyak 18,9% dan lebih dari 5 kg sebanyak 36,8%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memanfaatkan bank sampah dengan turut berperan aktif menyetorkan sampah anorganik. Mengenai keikutsertaan masyarakat dalam keanggotaan bank sampah setelah adanya program tergolong baik dan ditunjukkan oleh 26,4% responden sebagai anggota dalam periode kurang dari 1 tahun.



Gambar-2. Sebaran responden berdasarkan keanggotaan bank sampah dan Estimasi setoran sampah anorganik di Kalurahan Baciro

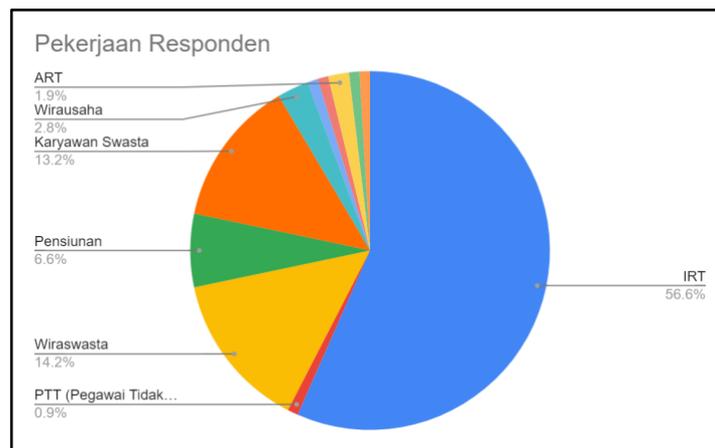
Berdasarkan data kuesioner, 91,5% responden mengetahui serta mendukung adanya Surat Edaran Walikota No.660/6123/SE/2022 tentang Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, 0,9% mendukung tetapi kurang mendukung, dan sisanya sebanyak 7,5% mengatakan tidak tahu. Selain itu sebanyak 91,5% mengetahui keberadaan bank sampah di lingkungan dan sisanya 8,5% mengatakan tidak mengetahui dimana. Sebanyak 98,1% mengatakan mereka mengetahui tujuan dari program bank sampah sedangkan sisanya 1,9% mengatakan tidak mengetahui.

Identitas dari responden dapat diketahui bahwa 82,1% merupakan perempuan dengan sisanya laki-laki sebanyak 17,9% dengan persebaran usia responden 50-60 tahun sebanyak 30,6%, 40-50 tahun sebanyak 27,4%, lebih dari 60 tahun sebanyak 23,6% dan sisanya 15-40 tahun sebanyak 12,2 %. Dalam hal ini menunjukkan tidak adanya generasi muda di bawah usia 20 tahun yang aktif berkontribusi dalam bank sampah. Nasabah atau partisipan bank sampah didominasi oleh usia menjelang lansia dan lansia. Ternyata, peran perempuan cukup signifikan dalam partisipasi mengaktifkan bank sampah. Padahal, jika dibandingkan dengan komposisi total penduduk yang ada di Kalurahan Baciro menunjukkan persentase usia di bawah 20 tahun (rentang 14 sampai 19 tahun) merupakan yang terbesar di Baciro sejumlah 9,7% atau sekitar 1.185 sampai 1.223 jiwa. Kondisi tersebut membuktikan terjadinya krisis regenerasi pengelolaan bank sampah.



Gambar-3. Kelompok umur penduduk Kalurahan Baciro

Apabila dilihat dari persebaran data pekerjaan responden memang lebih dari separuh anggota bank sampah merupakan IRT (Ibu Rumah Tangga). Namun, pekerja aktif dari kalangan wiraswasta dan karyawan swasta juga menduduki peringkat tiga terbesar persentase. Artinya, kendala keterbatasan waktu karena jam kerja bukan masalah utama terhadap kurang maksimalnya keikutsertaan warga dalam bank sampah.



Gambar-4. Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan

Pola pikir yang sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan mungkin menjadi titik prioritas sehingga seseorang mau bersusah payah meluangkan waktu, tenaga, atau uang untuk menjaga kelestarian alam. Wujud kesadaran dari para anggota bank sampah tersebut ditandai dengan 99,1% responden mengetahui kondisi terkini bahwa TPST Piyungan sudah melebihi kapasitas dan membutuhkan bantuan uluran tangan masyarakat agar mengurangi beban sampah akhir. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan melalui sosialisasi atau edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Sebanyak 78,3% responden mengatakan sudah pernah mendapatkan sosialisasi yang diberikan oleh berbagai pihak di antaranya: Kalurahan Baciro, DLH, PKK RT/RW, Relawan Zero Sampah, Pemda, Kader bank sampah, hingga media sosial. Berdasarkan hasil observasi dan pengisian kuesioner, masyarakat menyimpulkan bahwa beragam sosialisasi yang mengiringi berjalannya Program Gerakan Zero Sampah Anorganik berpengaruh terhadap persepsi mereka terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat merasa informasi-informasi yang disampaikan memberikan tambahan wawasan dan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Tugas faskel setelah adanya Program Gerakan Zero Sampah Anorganik masih sama, yakni mendampingi koordinator/kader bank sampah dan masyarakat dalam mengimplementasikan program tersebut di bank sampah yang telah ada. Jika sebelumnya laporan hanya diberikan kepada kalurahan maka sejak adanya program faskel dihauskan menginput laporan berupa data hasil rekap perolehan penimbangan di semua bank sampah pada sistem JSS (Jogja Smart Service). Laporan dapat berupa laporan deskriptif ataupun dokumentasi. Lebih lanjut, di bawah ini merupakan tabel berisi intisari dari wawancara dengan koordinator/kader dan faskel

bank sampah di Kalurahan Baciro. Berdasarkan analisis- analisis di atas, Kalurahan Baciro sudah mampu mengimplementasikan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik.

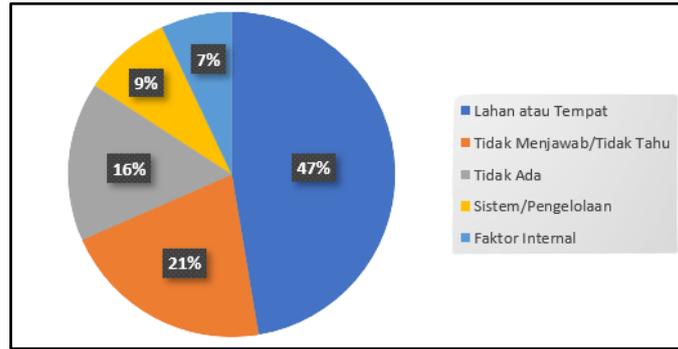
Tabel-1. Hasil wawancara bersama kader

RW	Hasil Wawancara
03	Sejak tahun 2015 Bank Sampah di RW 03 dibentuk hingga pelaksanaannya saat ini banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan itu seperti adanya beberapa masyarakat di RT 07 yang keluar dari keanggotaan Bank Sampah. Hal itu didasari kondisi tidak adanya tempat atau lahan untuk menampung sampah, ditambah dengan jarak tempat penimbangan Bank Sampah yang cukup jauh membuat sebagian besar dari mereka malas untuk mengantarkannya. Masalah lainnya, pengurus Bank Sampah juga mengalami penurunan dari 35 orang menjadi 7 orang. Namun hal tersebut tidak membuat Bank Sampah di RW 03 menjadi vakum dan masih eksis sampai saat ini meskipun yang berkontribusi semakin berkurang. Menurut pengamatan dari lapangan, kendala yang membuat masyarakat kurang berkontribusi, yaitu minimnya tempat untuk memilah dan menadah terlebih dahulu. Menanggapi itu, warga biasanya langsung menjual ke pengepul langsung supaya tidak terlalu menumpuk karena pelaksanaan penimbangan Bank Sampah dirasa terlalu lama (pelaksanaan 1 bulan sekali).
21	Awal berdirinya Bank Sampah di RW 21 pada tahun 2018 melalui perkumpulan PKK yang dijadikan sebagai salah satu momentum untuk sosialisasi Bank Sampah. Berawal hanya 5 KK yang terdaftar menjadi anggota Bank Sampah, terus berkembang saat ini menjadi 13 KK. Pelaksanaan penimbangan sampah dilakukan rutin pada akhir bulan (pelaksanaan 1 bulan sekali). Kegiatan bank sampah membantu mengurangi beban akhir sampah ke TPST hingga sekitar 21 ton/tahun.
06	Awal pendirian Bank Sampah di RW 06 mendapatkan bantuan timbangan digital dan tabungan juga ada tawaran SK (Surat Keputusan). Untuk saat ini, kendala yang terjadi adalah jumlah anggota Bank Sampah aktif semakin sedikit.
09	RW 09 di Kalurahan Baciro tidak memiliki Bank Sampah karena tidak ada SDM yang bersedia menjadi pengurus. Penduduk di sana rata - rata lansia, sedangkan untuk penduduk usia muda kebanyakan pengusaha, sehingga waktu mereka terbatas.
07	Sistem pengelolaan Bank Sampah di RW 07 untuk setiap anggotanya mempunyai buku pegangan tabungan berisi pendapatan penjualan sampah anorganik. Rata-rata anggota Bank Sampah 10-15 orang yang aktif mengikuti. Laporan diberikan per bulan.
12	Pengelolaan sampah di Baciro sudah dimulai sejak tahun 2015. Namun dulu belum seaktif saat ini. Kini, faskel (fasilitator kelurahan) selalu mendampingi Bank Sampah dan membuat laporan rutin ke JSS (Jogja Smart Service) berupa dokumentasi dan laporan deskriptif. Pelaksanaan Bank Sampah di RW 12 cukup baik. Mampu dilaksanakan penimbangan secara rutin dan masyarakatnya masih aktif berpartisipasi.

Sumber: Data diolah Penulis 2023

3.2 Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan dan hambatan pengelolaan sampah level rumah tangga di Kalurahan Baciro

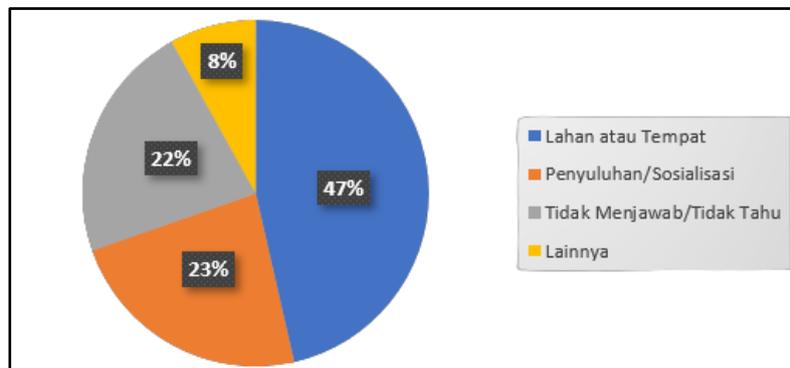
Dalam bagian ini, terdapat empat hal yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, responden diminta untuk memberikan perspektif mengenai kendala dalam proses pengelolaan sampah pada level rumah tangga. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar-5. Perspektif kendala pengelolaan sampah

Berdasarkan dari 106 total responden menyatakan kendala paling banyak, yaitu kurangnya ketersediaan lahan atau tempat pemilahan sampah. Masyarakat beranggapan bahwa pada level rumah tangga, tempat sampah yang ada disediakan oleh pribadi tetapi dengan kondisi dimana mayoritas tidak memiliki tempat sampah yang langsung dipilih berdasarkan jenisnya, selain itu karena berada di lingkup permukiman yang padat, masyarakat juga memiliki pada lahan yang relatif sempit untuk melakukan pengelolaan sampah. Sebanyak 18 responden mengatakan tidak ada kendala dalam level rumah tangga. Sebanyak 10 responden mengatakan terdapat kendala pada sistem atau pengelolaan, dimana berkaitan dengan kondisi jadwal petugas sampah yang sering tidak menentu sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Sebanyak 8 responden menyatakan terdapat faktor internal yang menjadi kendala, diantaranya seperti kesadaran diri yang masih kurang, dukungan keluarga yang kurang mendukung, serta tidak adanya waktu yang cukup untuk melakukan pengelolaan sampah.

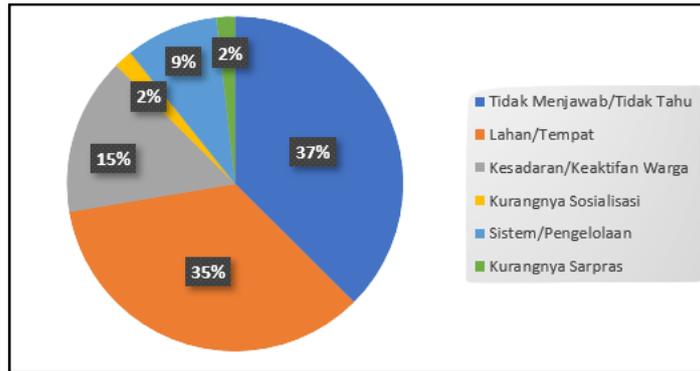
Kedua, responden diminta untuk memberikan perspektif mengenai hal-hal yang akan memudahkan dalam proses pengelolaan sampah pada rumah tangga. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar-6. Perspektif hal yang memudahkan dalam pengelolaan sampah

Dari 106 total responden menyatakan bahwa hal yang akan memudahkan dalam proses pengelolaan sampah pada rumah tangga adalah ketersediaan lahan atau tempat pemilahan sampah. Hal ini berbanding lurus dengan kendala yang paling banyak dialami oleh responden dimana mengenai permasalahan pada lahan atau tempat pemilahan. Sebanyak 26 responden menyatakan perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi untuk mempermudah pengelolaan sampah karena akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pengelolaan sampah. Sebanyak 25 responden menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu. Sebanyak 9 responden menyatakan hal lainnya, berupa adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran diri, adanya pemberian insentif, serta perbaikan pada jadwal pengoperasionalan bank sampah dan petugas sampah.

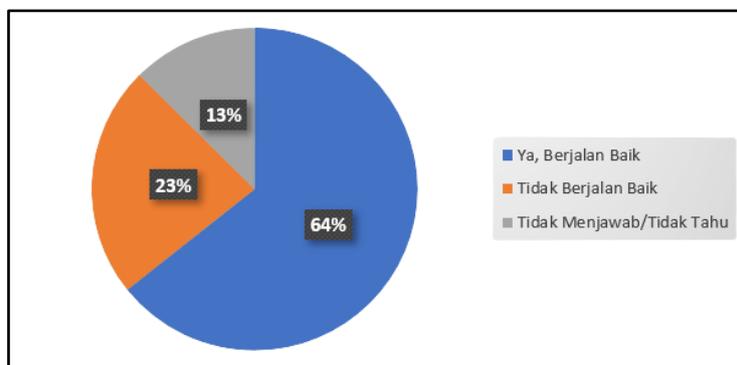
Ketiga, responden diminta untuk memberikan perspektif mengenai kendala pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan tempat tinggal. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar-7. Perspektif kendala pengelolaan sampah

Sebanyak 42 responden tidak menjawab atau tidak mengetahui mengenai kendala pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan tempat tinggal. Sebanyak 39 responden menyatakan kendala yang ditemui adalah mengenai lahan dan tempat pemilahan sampah. Sebanyak 17 responden menyatakan terdapat kendala pada kesadaran dan keaktifan warga sekitar untuk ikut dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, hal ini dikarenakan banyak warga yang masih enggan serta pasif dalam ikut kepesertaan. Sebanyak 2 responden menyatakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak terkait terhadap warga tentang penyuluhan dari pengelolaan sampah rumah tangga. Sebanyak 10 responden menyatakan terdapat kendala pada sistem atau pengelolaan, diantaranya adalah lamanya alur penimbangan, ketidakjelasan sistem dari bank sampah hingga sulitnya mendapatkan pelapak atau pengepul yang dapat menerima keseluruhan jenis sampah anorganik, hal ini terjadi karena tidak semua pengepul menerima semua jenis sampah untuk diambil. Sebanyak 2 responden menyatakan terdapat kendala pada kurangnya sarana dan prasarana seperti alat timbangan dan penyediaan alat pendukung pengumpul sampah.

Keempat, responden diminta untuk memberikan perspektif mengenai jalannya kegiatan bank sampah di level rukun warga. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:



Gambar-8. Perspektif jalannya bank sampah

Sebanyak 72 dari 106 responden menyatakan jalannya kegiatan bank sampah di level rukun warga sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 26 responden menyatakan tidak berjalan baik dengan beberapa alasan, diantaranya berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif dalam kegiatan bank sampah, masih kurangnya sosialisasi, kondisi yang belum pulih pasca pandemi, dan masa pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara dari para responden didapatkan tiga garis besar saran dari masyarakat yang dapat menjadi langkah untuk pengembangan bank sampah kedepannya. Pertama adalah penyediaan fasilitas, peningkatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, dan peningkatan pengelolaan bank sampah. Penyediaan fasilitas diantaranya adalah penyediaan lahan bagi operasional bank sampah, dikarenakan sebagian besar luasan lahan dari bank sampah memiliki ketersediaan yang terbatas dengan lahan yang sempit dimana menjadi hambatan dalam operasional bank sampah. Saran lainnya berkaitan dengan fasilitas adalah penyediaan tempat sampah satuan pada tiap RW di lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat memiliki keterbatasan pada tempat sampah satuan yang tidak memiliki fasilitas pemilahan sampah berdasarkan jenis, sehingga masyarakat mengharapkan adanya penyediaan fasilitas pemilahan sampah

di sekitar tempat tinggal. Hal lainnya adalah penyediaan bank sampah yang sempit vakum pada beberapa RW, seperti RW 9 dan 8 dimana berkaitan dengan pengelolaan pengurus.

Kedua, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus di masyarakat karena ketidakmerataan sosialisasi yang banyak didapatkan oleh koordinator dan pengelola dari bank sampah, sedangkan masyarakat secara umum dalam hal ini adalah anggota bank sampah jarang mendapatkan sosialisasi maupun pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Sosialisasi atau pelatihan dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait seperti fasilitator kalurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), atau komunitas masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ketiga, peningkatan pengelolaan bank sampah. Hal pertama yang menjadi saran adalah peningkatan pada kapasitas dan pembinaan terhadap koordinator serta pengurus bank sampah yang belum optimal dalam pelaksanaan operasionalnya, diantaranya di RW 8 dan RW 9, selain itu perlu adanya upaya regenerasi dan peningkatan minat bagi generasi yang lebih muda untuk lebih aktif dalam upaya pengelolaan bank sampah. Hal kedua, adalah mengenai anggaran untuk operasional dari bank sampah yang berkaitan dengan peningkatan fasilitas operasional bank sampah, seperti perbaikan tempat dan penggantian alat. Selain itu pemberian insentif juga menjadi hal yang disorot dalam hal ini adalah pemberian balas jasa terhadap pengelola dan masyarakat, meskipun dalam hal ini kegiatan bersifat sukarelawan tetapi masyarakat merasa perlu adanya insentif yang dapat berupa uang atau apresiasi terhadap pelaksanaan bank sampah. Apresiasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemberian kunjungan untuk peningkatan moral atau pemberian apresiasi berupa sertifikat bagi pengelola dan masyarakat.

3.3 Relevansi Penerapan Pengelolaan Sampah Level Rumah Tangga di Kalurahan Baciro dengan Kondisi Kesehatan Masyarakat

Secara umum, saat ini memang belum ada masalah krusial terkait kesehatan di kalangan warga/masyarakat Kalurahan Baciro yang diakibatkan oleh sampah. Pendirian bank sampah pada awalnya juga tidak ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga, melainkan lebih menitikberatkan pada pengurangan sampah. Secara tidak langsung, upaya pengurangan sampah tersebut akan berdampak lebih luas terhadap masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar TPST Piyungan. Apabila pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta atau dalam kasus ini di Kalurahan Baciro tidak dibatasi maka beban sampah di TPST Piyungan yang sudah *over-capacity* juga semakin parah. Berimbas terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah TPST Piyungan. Dampak buruk tersebut berupa pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri.

Kehadiran bank sampah dan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik dalam penerapannya berhasil menyelamatkan kondisi lingkungan di lingkup Kalurahan Baciro dan sedikit meringankan TPST Piyungan. Akan tetapi, temuan masalah selama pelaksanaan bank sampah menunjukkan bahwa keterbatasan tempat/lahan dan kondisi antar rumah yang padat di Kalurahan Baciro berisiko menimbulkan efek negatif lanjutan. Pelaksanaan bank sampah di Kalurahan Baciro menerapkan sistem tampung sampah di rumah masing-masing hingga waktu penimbangan bank sampah tiba. Selama periode menunggu tibanya waktu penimbangan, otomatis sampah anorganik yang sudah dipilah akan tertimbun di rumah. Timbunan sampah tersebut berakibat pada timbulnya bau yang kurang sedap, menjadi sarang tikus, hingga tempat berkembangbiaknya bakteri. Maka dari itu, anggota bank sampah dengan lahan/kondisi rumah sempit akan lebih rentan terpapar penyakit yang disebabkan dari timbunan sampah. Masalah kesehatan yang muncul seperti timbulnya penyakit diare, tifus, polio dan cacingan. Hematnya, secara tidak langsung pelaksanaan bank sampah dengan sistem tersebut berisiko mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus menjadi permasalahan baru.

Berdasarkan informasi di lapangan yang kami dapatkan, pihak Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya menekan jumlah akhir sampah rumah tangga dengan menerapkan pembatasan jumlah sampah yang dibuang ke TPS terdekat. Lantas sebagian masyarakat justru beralih membuang sampah-sampah rumah tangga mereka di sembarang tempat, seperti di tempat sampah taman-taman kota, pinggir jalan raya, sungai-sungai, hingga ke tempat sampah yang dimiliki oleh kantor-kantor atau rumah warga lainnya. Kondisi ini jelas berakibat memunculkan penimbunan sampah di lokasi yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan dalam jumlah besar. Dampak buruk instruksi pembatasan sampah per rumah tangga oleh pemerintah ini pada akhirnya berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, berikut beberapa kesimpulan atas penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan sampah level rumah tangga di Kalurahan Baciro, Kota Yogyakarta:

1. Inisiasi bank sampah di Kalurahan Baciro sudah ada sejak 2015 dan terus berkembang hingga saat ini. Di awal pendirian, jumlah RW yang ikut serta mendirikan bank sampah masih sangat sedikit. Masyarakat utamanya koordinator/kader bank sampah berperan penting dalam pendiriannya. Pemerintah/instansi terkait turut membantu melalui bentuk pemberian fasilitas, kegiatan sosialisasi/edukasi, dan mendampingi pelaksanaan bank sampah melalui faskel. Namun, setelah adanya Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, jumlah RW yang mendirikan bank sampah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut telah berhasil mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik.
2. Adanya Program Gerakan Zero Sampah Anorganik ternyata berhasil membawa perkembangan lebih baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Baciro. Wujud perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi pemberdayaan masyarakat dan implementasi bank sampahnya yang telah termonitor ke sistem JSS (Jogja Smart Service). Artinya, Kalurahan Baciro sudah mampu mengimplementasikan kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik.
3. Perspektif masyarakat terhadap faktor yang menghambat proses pengelolaan sampah adalah terbatasnya lahan dan tempat pemilahan sampah, sedangkan untuk faktor mendukung keberhasilan adalah jika terdapat ketersediaan lahan yang cukup dan peningkatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah. Masyarakat menilai bahwa jalanya kegiatan bank sampah di Kalurahan Baciro sudah berjalan dengan baik. Maka, dengan kata lain kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik juga terimplementasi dengan baik.
4. Masalah keterbatasan lahan dalam penerapan pengelolaan sampah level rumah tangga di Kalurahan Baciro memiliki relevansi dengan kondisi kesehatan masyarakat. Sampah yang tertimbun akan berdampak pada kesehatan masyarakat sebab sampah yang dipilah dan disimpan di rumah berisiko menimbulkan penyakit dan menjadi sarang tikus karena lamanya waktu tunggu penimbangan. Selain itu, pembatasan pembuangan sampah ke TPS berdampak pada penimbunan sampah di pinggir jalan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dan secara tidak langsung dampak dari kesehatan tersebut akan berdampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran berikut perlu dijadikan refleksi:

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat serta dorong dalam kegiatan pengelolaan sampah termasuk bank sampah di setiap RW Kalurahan Baciro yang mana melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Apresiasi perlu dihadirkan dalam upaya mendukung keberlangsungan dari program pengelolaan sampah dimulai dari tingkat RT hingga di level Kalurahan.
3. Metode pendekatan sistem pengelolaan sampah harus meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, ketersediaan lahan, pembiayaan.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif, apabila mempunyai rentang waktu yang lama peneliti selanjutnya dapat menganalisis kendala dan solusi implementasi program tersebut dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affila, A., & Afnila, A. (2021). Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Deli Serdang. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 213-224. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.213>
- Alestri, G. N. (2022). Dampak Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungku Kota Cirebon. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(2), 151-162. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i2.151-162>
- Amalia, Shafiera. (2020). Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 206-232. SSN 1829 -8974

- Andani, B. E., & Sukei, T. W. (2022). Pengelolaan Bank Sampah Melalui Rumah Pilah Alam Lestari di Dusun Ceme Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 200-209. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.200-209>
- Apriliyanti, P.D., dkk. (2015). Evaluasi Kinerja Bank Sampah Kartini Mandiri Desa Pesanggrahan Kota Batu. *J-Pal*,6(2), 143-152. ISSN: 2087-3522
- Ariawan, I. W., Indrayani, L., & Irwansyah, M. R. (2020). Evaluasi Program Bank Sampah Sibuh Nirmala di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 22-30. DOI: <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p22-30>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136-141. DOI:10.22146/jml.18783
- Haryanti, S., Gravitiani, E., & Wijaya, M. (2020). Studi Penerapan Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta. *Journal Bioeksperimen*. Vol. 6 (1) Pp. 60-68. Doi: 10.23917/bioeksperimen.v6i1.2795
- Kusumaningtyas, D. A., Mulasari, S. A., & Rosyidah. (2020). Screening dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan dan Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.12928/jkpl.v1i1.1643>
- Linawati.(2020). Bank Sampah Penguat Kesehatan Dan Ekonomi Keluarga. *JCEE (Journal of Community Engagement and Employment)*, 2 (1), 71-77.
- Mulasari Sasti, Kusumaningtyas DA, & Rosyidah R. (2020). Screening Dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan dan Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 39-50. DOI: 10.12928/jkpl.v1i1.1643
- Pribadi, U., Aji, J. S., & Widayat, R. M. (2021). Inisiasi Pendirian dan Pengelolaan Bank Sampah. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(2), 227–236. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.9725>
- Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2012). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31-38. DOI: 10.14710/jil.9.1.31-38
- Santifa, M., & Harahap, D. (2020). Strukturasi: Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kalurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98. DOI: 10.32722/jimap.v1i1.203
- Sonia, N. K. H., Aryana, I. K., & Jana, I. W. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Pekerjaan Kepala Keluarga dengan Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah (Studi di Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 12(1), 7-16. DOI: <https://doi.org/10.33992/jkl.v12i1.1972>
- Umbulharjo, D. I. K., Yogyakarta, K., & Ardelia, D. R. (2022). Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Rekomendasi Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Published online. DOI: 10.31227/osf.io/75n9f